

# **UPAYA HUKUM DALAM PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK**

**Oleh : Suhartini Karjo**

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Sulfat Agung VIII No. 35, Purwantoro, Blimbing, Malang  
Email : [suhartinikarjo@yahoo.com](mailto:suhartinikarjo@yahoo.com)

## **Abstrak**

Berdasarkan penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan faktor yang menyebabkan terjadinya keberatan adanya perbedaan antara wajib pajak dan fiskus, karena perbedaan jumlah nominal yang dibayarkan oleh wajib pajak. Untuk prosedur adalah surat ketetapan pajak lebih bayar harus diperiksa terlebih dahulu kemudian baru bisa mengajukan keberatan, setelah keberatan diterima wajib pajak dapat mengajukan banding, banding diterima wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Makamah Agung.

Kata kunci : pajak, Makamah Agung, peninjauan kembali

## **Abstract**

Based on said study a conclusion can be found, factors which lead to objections, the difference between tax payer and tax officers because of nominal differences paid by tax payer. For procedures, overpayment tax assessment letter has to be investigated first then an objection can be applied, after objection is received taxpayer can apply for an appeal, when appeal is received, taxpayer can apply for review to supreme court.

Keywords: tax, supreme court, review

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan sebuah negara yang sedang melakukan pembangunan disegala bidang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Agar pembangunan yang dilaksanakan berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari berbagai potensi sumber daya yang dimiliki oleh Negara Indonesia ini baik dari hasil sumber kekayaan alam seperti, minyak bumi dan gas alam maupun dari iuran masyarakat yang berupa setoran pajak. Pajak memiliki peran yang sangat penting dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan. Pada tahun 2016, dari total realisasi pendapatan negara sebesar Rp 1.802,5 Triliun, pajak memberikan kontribusi sebesar 74,6% atau setara dengan Rp 1.546,7 Triliun

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak negara di masa krisis global menjadikan pajak sebagai instrumen ekonomi yang memberikan kehidupan bagi berlangsungnya pembangunan. Pemerintah melalui Dirjen Pajak telah menetapkan pajak sebagai komponen strategi perencanaan pembangunan. Penerimaan pajak dalam negeri mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Namun dalam kenyataan di lapangan pelaksanaan pajak masih belum sempurna, dimana masih ada ketidakseimbangan antara hak negara dan hak warga negara sebagai pembayar pajak, maka hak dan kewajiban Wajib Pajak diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Apabila Wajib Pajak baik dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melakukan hal-hal yang melanggar peraturan perpajakan, maka akan terancam dikenakan sanksi seperti yang diatur dalam Undang-Undang

Perpajakan. Tetapi apabila Wajib Pajak merasa bahwa kesalahan yang dilakukannya masih dapat diperbaiki, maka Wajib Pajak juga mempunyai hak untuk melakukan pembetulan seperti yang diatur dalam Ketentuan Umum Perpajakan pasal 8. Selain itu, Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan dan untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah dan fokus maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan keberatan pajak? ; (2) Bagaimana prosedur pengajuan keberatan pajak?. Penelitian ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya keberatan pajak, untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan keberatan. Dalam hal ini kepenulisan ini mempunyai manfaat Teoritis yaitu yakni dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan ilmu hukum, yaitu Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Pajak yang berkenaan dengan pengajuan keberatan yang dilakukan wajib pajak penghasilan dan pengenaan sanksi denda. Sedangkan manfaat Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman untuk mengetahui pengajuan keberatan yang dilakukan wajib pajak dan memberikan pemikiran atau solusi mengenai masalah yang berkaitan dengan keberatan ketetapan pajak mengenai sanksi denda.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dimana penulis mendeskripsikan tentang ketetapan pajak yang berlaku dan apa saja yang menjadi faktor – faktor yang mempengaruhi keberatan dan banding atas surat ketetapan pajak. Untuk kepenulisan karya ilmiah penulis menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Lokasi penelitian dilakukan di perusahaan XYZ di Jawa Timur. Jenis pendekatan yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas.

Data yang akan digunakan di dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer, yaitu data primer adalah data yang diperoleh dari data sekunder melalui dokumentasi di tempat penelitian yang berlokasi di Jawa Timur. Pengambilan data dilakukan dengan Observasi secara langsung ke lokasi perusahaan. Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penulisan ini. Dalam penulisan ini menggunakan acuan dari KUP dari pasal 25 -26 Tahun 2008. UU Pengadilan Pajak Pasal 42, 46.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi, observasi bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Pengamatan bersifat non-partisipatif, yaitu peneliti berada diluar sistem yang diamati dan tidak kalah penting dari metode-metode lain adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Analisis data dilakukan pada saat mengumpulkan data dan setelah pengumpulan data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai subjek yang diteliti dan

tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis (Adi, 2004, h.117). Menurut Miles dan Huberman (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008, h. 209) ada tiga kegiatan yang dilakukan dalam melakukan analisis data diantaranya dengan: reduksi data dan penyajian data dan terakhir menarik kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **Faktor – Faktor Penyebab Keberatan Ketetapan Pajak**

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2015 yang menyatakan rugi sebesar Rp 10.254.603.771 dan lebih bayar sebesar Rp 664.876.000. Atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan ini oleh fiskus dilakukan pemeriksaan pajak dengan produk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebesar Rp 375.179.750 dan kerugian wajib pajak hanya diakui sebesar Rp 8.315.462.746. Perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan fiskus ini menyebabkan wajib pajak melakukan upaya hukum keberatan dan selanjutnya mengajukan banding di Pengadilan Pajak.

### **Prosedur Keberatan Pajak**

Kronologi proses pemeriksaan pajak, pengajuan keberatan, dan banding adalah sebagaimana berikut ini :

**Pemeriksaan Pajak** Dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan disebutkan bahwa Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lebih lanjut dalam aturan pelaksanaan yakni Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 184/PMK.03/2015 disebutkan bahwa Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

PT XYZ

LABA / RUGI

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015

( dalam rupiah )

| Uraian                | Jumlah         |
|-----------------------|----------------|
| Peredaran Usaha       | 65.789.385.220 |
| Harga Pokok Penjualan | 58.623.364.623 |
| Laba Bruto            | 7.166.020.588  |
| Biaya Usaha           | 9.105.161.613  |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Penghasilan neto Dalam Negeri         | (1.939.141.025)  |
| Penghasilan neto Dalam Negeri Lainnya | 0                |
| Penghasilan dari Luar Usaha           | (8.315.462.746)  |
| Jumlah Penghasilan neto               | (10.254.603.771) |
| Pajak Penghasilan terutang            | 0                |
| Kredit Pajak                          |                  |
| PPh Ps.22                             | 664.876.000      |
| PPh Kurang/Lebih Bayar                | (664.876.000)    |

Dari laporan laba/rugi tersebut terdapat keterangan bahwa peredaran usaha yang merupakan penjualan dari usaha pokok adalah sebesar Rp 65.789.385.220. Atas penjualan dari produk utama ini wajib pajak mengalami kerugian sebesar Rp 1.939.141.025 disebabkan harga pokok penjualannya sebesar Rp 58.623.364.623 dan dibayar biaya usaha sebesar Rp 9.105.161.613. Selain itu dari penjualan produk selain usaha pokok juga dialami kerugian sebesar Rp 8.315.462.746 sehingga seluruh kerugian adalah sejumlah Rp 10.254.603.771. Dalam posisi demikian maka untuk tahun pajak 2015 wajib pajak tidak terbebani pajak yang terutang bahkan terdapat kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 664.876.000. Lebih bayar Pajak Penghasilan sebesar Rp 664.876.000 berasal dari pemungutan PPh Ps.22 yang dilakukan oleh pihak pembeli sebagai pemungut pajak. Atas lebih bayar Pajak Penghasilan sebesar Rp 664.876.000 diajukan pengembalian pembayaran pajak kepada fiskus dan wajib pajak berhak untuk melakukan kompensasi kerugian sebesar Rp 10.254.603.771 dengan penghasilan neto tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan permohonan ini fiskus merespon dengan melakukan pemeriksaan pajak.

**Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan** dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Jangka waktu pemeriksaan meliputi jangka waktu pengujian paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak dan jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Dari surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib pajak dapat diketahui bahwa fiskus tidak menyetujui peredaran usaha dari usaha pokok dan melakukan koreksi positif dari Rp 65.789.385.220 menjadi sebesar Rp 71.669.877.505. Sebaliknya atas harga pokok penjualan dilakukan koreksi negatif dari Rp 58.623.364.623 menjadi sebesar Rp 58.658.069.474 sehingga laba bruto dihitung sebesar Rp 13.011.808.031. Semula wajib pajak menghitung laba bruto dari usaha pokok hanya sebesar Rp 7.166.020.588. Di samping itu fiskus juga menyatakan ketidaksetujuannya atas biaya promosi sebesar Rp 750.489.428. Walaupun fiskus menyampaikan bahwa biaya promosi yang dibebankan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010, namun tidak melakukan koreksi atas biaya usaha sebesar Rp 9.105.161.613. Dengan dilakukan koreksi oleh fiskus

atas peredaran usaha dan harga pokok penjualan maka terjadi perbedaan penghitungan penghasilan netto dari usaha pokok dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan menurut perhitungan wajib pajak dengan fiskus. Menurut fiskus penghasilan netto dari usaha pokok adalah sebesar Rp 3.906.646.418. Tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai kerugian wajib pajak penghasilan dari luar usaha pokok yakni sebesar Rp 8.315.462.746. Seharusnya berdasarkan perhitungan kerugian penghasilan dari luar usaha pokok yang lebih besar dari penghasilan netto dari usaha pokok, wajib pajak masih menderita kerugian. Menurut fiskus wajib pajak memperoleh penghasilan netto dari seluruh usaha baik dari usaha maupun dari luar usaha pokok sebesar Rp 1.158.787.411. Berdasarkan penghasilan netto dihitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang sebesar Rp 289.696.750, sedangkan menurut wajib pajak adalah nihil. Fiskus menghitung kelebihan pembayaran pajak hanya sebesar Rp 375.179.750, sedangkan menurut wajib pajak adalah sebesar PPh Ps.22 yang dipungut oleh pembeli yakni Rp 664.876.000.

**Pembahasan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan** merupakan surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi. Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan diterbitkan oleh fiskus tidak melebihi jangka waktu pengujian dalam rangka pemeriksaan uji kepatuhan dengan pemeriksaan lapangan yakni enam bulan. Hal ini berarti bahwa fiskus telah memenuhi Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 184/PMK.03/2015. Wajib pajak telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan sanggahan secara tertulis tertulisatas pendapat fiskus dalam jangka waktu dalam jangka waktu paling lama tujuh hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Ketentuan formal Pasal 42 ayat (2) aturan pelaksanaan pemeriksaan tersebut telah dilakukan oleh wajib pajak. Dalam surat sanggahan, wajib pajak tidak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan, yakni hanya sependapat dengan koreksi fiskal negatif atas harga pokok penjualan. Lebih lanjut fiskus berdasarkan Pasal 43 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 184/PMK.03/2015 mengundang wajib pajak untuk dilakukan pembahasan hasil pemeriksaan. Undangan untuk membahas temuan sementara hasil pemeriksaan disampaikan tidak melebihi tiga hari kerja setelah fiskus menerima surat sanggahan dari wajib pajak. Pada peredaran usaha terdapat perbedaan sebesar Rp 5.880.492.285, menurut pemeriksa pajak Rp 71.669.877.505 sedangkan menurut wajib pajak sebesar Rp65.789.385.220. Berawal dari perbedaan penilaian peredaran usaha mengakibatkan penghasilan netto dalam negeri dihitung oleh pemeriksa pajak Rp 3.906.646.418. Menurut perhitungan wajib pajak, penghasilan netto dalam negeri mengalami kerugian Rp 1.973.845.867 ditambah dengan kerugian atas penghasilan dari luar usaha Rp 8.315.462.746. Disebabkan kerugian seluruhnya Rp 10.289.308.613 maka tidak ada pajak penghasilan yang terutang. Menurut pemeriksa pajak, walaupun dari penghasilan dari luar usaha mengalami kerugian Rp 8.315.462.746, wajib pajak masih memperoleh penghasilan netto sebesar Rp 1.158.787.411. Oleh karena itu terutang pajak penghasilan Rp 289.696.750 sehingga pajak penghasilan lebih bayar hanya sebesar Rp 375.179.750. Menurut perhitungan wajib pajak, lebih bayar pajak penghasilan adalah sebesar Rp 664.876.000.

Selisih peredaran usaha Rp 5.880.492.285 menurut pemeriksa disebabkan penjualan sebesar Rp 65.789.385.220 merupakan transaksi yang terkait dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Apabila penjualannya kepada pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa, harga wajarnya sebesar Rp 71.669.877.505. Ketentuan mengenai hubungan istimewa diatur Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hubungan istimewa dianggap ada jika wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung

paling rendah 25% pada wajib pajak lain. Pada mulanya wajib pajak tidak mengakui, namun pemeriksa pajak dapat menunjukkan dokumen terkait. Wajib pajak kemudian mempermasalahkan metode yang dipakai dalam menentukan harga pasar wajar. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, fiskus berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya. Kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebanding atau sama dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang dijadikan pembandingnya. Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER- 43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Nomor PER-32/PJ/2011 juga disebutkan penjelasan yang sama. Transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam hal tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan. Apabila terdapat perbedaan kondisi, namun dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba. Dalam melakukan analisis kesebandingan, pemeriksa pajak juga memperhatikan karakteristik barang, fungsi masing-masing pihak yang melakukan transaksi, ketentuan dalam kontrak/perjanjian sebagaimana petunjuk Pasal 5 Peraturan Dirjen Pajak tersebut.

Perbedaan pendapat berikutnya antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak adalah berkenaan dengan timbulnya jumlah penghasilan neto sebesar Rp 1.158.787.411. Dalam hal ini pemeriksa pajak tidak memberikan penjelasan dengan angka yang rinci. Wajib pajak berpendapat bahwa walaupun akhirnya pemeriksa pajak menghitung penghasilan neto dalam negeri Rp 3.906.646.418, masih terdapat kerugian sebesar Rp 4.408.816.328 dikarenakan dari penghasilan di luar usaha dialami kerugian Rp 8.315.462.746. Pemeriksa pajak menyarankan wajib pajak untuk melakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan. Surat permohonannya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Permohonan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penandatanganan risalah pembahasan hasil pemeriksaan. Tim Quality Assurance Pemeriksaan merupakan tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka membahas hasil pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dan wajib pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan guna menghasilkan Pemeriksaan yang berkualitas. Berdasarkan Pasal 49 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 184/PMK.03/2015, Tim Quality Assurance Pemeriksaan memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak. Simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat bersifat mengikat kedua belah pihak.

**Pengajuan Keberatan** Dari pembahasan hasil pemeriksaan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dapat diketahui bahwa antara wajib pajak dengan pihak fiskus masih terdapat perbedaan pendapat mengenai Peredaran usaha, Penghasilan neto Dalam Negeri,

Pajak Penghasilan terutang, dan jumlah Pajak Penghasilan Lebih Bayar. Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 wajib pajak mengajukan keberatan atas materi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar kepada Direktur Jenderal Pajak. Pengajuan keberatan wajib pajak telah memenuhi persyaratan formal dan material sebagaimana ditentukan dalam aturan pelaksanaan pengajuan keberatan. Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 202/PMK.03/2015. Dalam memproses permohonan pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, penelaah keberatan telah memenuhi Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 202/PMK.03/2015. Peminjaman buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi. Penelaah keberatan meminta wajib pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan.

**Pengajuan Banding** Sampai dengan diterbitkan Surat Keputusan Keberatan masih terdapat perbedaan pendapat antara fiskus dengan wajib pajak, terutama mengenai jumlah Pajak Penghasilan yang lebih dibayar dan besarnya kerugian yang dapat dikompensasikan terhadap penghasilan netto tahun berikutnya. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, wajib pajak mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Wajib pajak sebagai pemohon banding telah melaksanakan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding yakni Surat Keputusan Keberatan. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding. Di samping itu juga dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding.

Langkah berikutnya Pengadilan Pajak melakukan penelitian formal terhadap Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Surat Keputusan Keberatan. Penerbitan produk hukum dinilai telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 beserta aturan pelaksanaannya. Dari dokumen Banding dapat diketahui bahwa Pengadilan Pajak, wajib pajak, dan pihak fiskus telah memenuhi ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang berkenaan dengan Surat Uraian Banding dan Surat Bantahan. Pengadilan Pajak meminta Surat Uraian Banding atas Surat Banding kepada terbanding dalam hal ini pihak fiskus dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Banding. Terbanding menyerahkan Surat Uraian Banding dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Uraian Banding. Surat Uraian Banding oleh Pengadilan Pajak dikirim kepada pemohon Banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima. Pemohon Banding menyerahkan Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima salinan Surat Uraian Banding. Salinan Surat Bantahan dikirimkan kepada terbanding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Bantahan. Dalam Surat Uraian Banding fiskus tetap berpendapat bahwa Pajak Penghasilan Lebih Bayar sebesar Rp 375.179.750. Demikian pula wajib pajak, dalam Surat Bantahannya menyatakan Lebih Bayar sebesar Rp 664.876.000. Hakim Pengadilan Pajak memutuskan sengketa Banding atas Surat Keputusan Keberatan berdasarkan Pasal 69, Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2002. Bahwa alat bukti dapat berupasurat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan para saksi, pengakuan para pihak, dan/atau pengetahuan Hakim.

Kedaaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal. Bahwa Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila Majelis di dalam mengambil putusan dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan sehingga putusan diambil dengan suara terbanyak, pendapat Hakim Anggota yang tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam putusan Pengadilan Pajak. Bahwa penjualan sebesar Rp 65.789.385.220 merupakan transaksi yang terkait dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Fiskus berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan menjadi sebesar Rp 71.669.877.505 sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen. Putusan ini didasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 berikut aturan pelaksanaannya Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER- 43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Nomor PER-32/PJ/2011. Koreksi peredaran usaha terbanding sebesar Rp 5.880.492.285 (Rp 71.669.877.505 – Rp 65.789.385.220) dapat dipertahankan. Adapun koreksi Jumlah Penghasilan netto terbanding sebesar Rp 1.158.787.411 tidak dapat dipertahankan.

| Tabel 3.7   |                          |               |   |
|---|--------------------------|---------------|---|
| Ringkasan Putusan Pengadilan Pajak  |                          |               |   |
| No.   | Uraian                   | Rp            | Keterangan  |
| (1)   | Penghasilan netto (rugi) | 4.721.704.804 | Koreksi peredaran usaha<br><b>Rp 5.880.492.285</b><br>(Rp 71.669.877.505<br>dikurangi<br>Rp 65.789.385.220)<br>dapat dipertahankan. |
| (2)   | Penghasilan Kena Pajak   | 0             |   |
| (3)   | PPh terutang             | 0             |   |
| (4)   | Kredit Pajak             | 664.876.000   |   |
| (5)   | PPh Lebih Bayar          | 664.876.000   |   |
|   |                          |               | koreksi Penghasilan netto<br><b>Rp 1.158.787.411</b><br>tidak dapat dipertahankan.  |
| Kerugian menurut wajib pajak sebesar Rp 10.254.603.771 hanya diakui sebesar Rp 4.721.704.804 dengan Lebih Bayar tetap sebesar Rp 664.876.000. |                          |               |   |



Sumber Data : PT XYZ

## **PENUTUP**

Surat ketetapan pajak muncul karena beberapa alasan, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi terjadinya keberatan pajak adalah adanya perbedaan antara wajib pajak dan fiskus karena perbedaan jumlah nominal yang di bayarkan oleh wajib pajak.

Sesuai ketentuan perundang-undangan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus terlebih dulu dilakukan pemeriksaan pajak. Setelah masa pengujian berakhir, pemeriksa pajak berkewajiban menyampaikan temuan sementara melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak untuk ditanggapi dan kemudian dilakukan pembahasan dengan pemeriksa pajak. Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang diterbitkan oleh fiskus, wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan Keberatan kepada Dirjen Pajak. Setelah putusan Hakim Pengadilan Pajak diterbitkan, wajib pajak dapat menempuh upaya hukum Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bohari,H. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Hariyasin. 2018. *Praktik Berbicara pada Pengadilan Pajak di Indonesia*. Daerah Istimewa Yogyakarta : PT. Kanisius
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Pamungkas, Hangoro.2012. *Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bina Nusantara University
- Prianta, Diaz. 2012, *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Pembahasan Lengkap dan Terkini disertai CD Praktikum*. Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media Penerbit
- Pudyatmoko,Sri Y. 2009 . *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Resmi, Siti.2012 *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Setyasari, Nadia. 2018. *Pengajuan Keberatan Oleh Wajib Pajak Penghasilan dan Pengenaan Sanksi Denda (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung)*. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Undang-Undang Perpajakan
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.

